



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 38.A TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kota Ternate dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011-2015.;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M,PAN/5/2007PER/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2011-2015;

Memperhatikan : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TERNATER TAHUN 2016-2021.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Walikota adalah Walikota Ternate
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan satuan kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

### BAB II

#### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

##### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ternate sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ternate digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk:

- a. menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota ternate tahun 2011-2015 yang disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan daerah yang disusun setiap tahun.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 Januari 2017

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

  
**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 306.A

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 38.A TAHUN 2017

TANGGAL : 17 Januari 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN 2016-2021.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1 Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat	1 Angka Partisipasi Kasar SD	$APK\ SD = \frac{\text{Jumlah Siswa SD/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2 Angka Partisipasi Kasar SMP	$APK\ SMP = \frac{\text{Jumlah Siswa SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3 Angka Partisipasi Murni SD	$APK\ SD = \frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7 - 12 Tahun Jenjang SD/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4 Angka Partisipasi Murni SMP	$APK\ SMP = \frac{\text{Jumlah Siswa Usia 13 - 15 Tahun Jenjang SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	5 Angka Partisipasi PAUD	$AP\ Paud = \frac{\text{Jumlah Siswa Usia pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak Usia 4 - 6 tahun}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas kesehatan	6 Angka kematian ibu per 100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan
	7 Angka kematian bayi per 1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi sejak lahir hingga usia 1 tahun karena proses persalinan atau penyakit}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan
	8 Angka Usia Harapan Hidup	Jumlah rata – rata usia penduduk pada tahun t	Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan

3	Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran	9	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Tenaga Kerja
		10	Tingkat kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat miskin dalam satu wilayah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Sosial
4	Meningkatnya jaminan dan perlindungan social	11	Persentase PMKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Sosial
		12	Persentase masyarakat miskin yang telah memperoleh jaminan sosial kesehatan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah keluarga miskin dalam satu tahun tertentu}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	13	Persentase jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{panjang seluruh jalan}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		14	Cakupan pelayanan air bersih	$\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani (jiwa)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayah pelayanan (jiwa)}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	PDAM Kota Ternate
		15	Cakupan jembatan kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang total jembatan}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan efektif	16	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate	Cukup Jelas	Laporan Tahunan	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		17	Nilai/Predikat hasil evaluasi SAKIP	Cukup Jelas	Laporan Tahunan	Inspektorat

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
7 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	18 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Pemerintah Kota Ternate	Diperoleh dari Hasil Survey	Laporan Tahunan	Bagian Organisasi Sekretaris Daerah
8 Terwujudnya pelestarian budaya lokal	19 Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	Cukup Jelas	Laporan Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9 Terwujudnya masyarakat Kota Ternate yang agamais	20 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al Quran	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD kelas 6 beragama islam yang dapat baca tulis alquran}}{\text{Jumlah siswa SD kelas 6 beragama islam}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	21 Juara umum kegiatan STQ/MTQ	Cukup Jelas	Laporan Tahunan	Bagian Kesra Sekretaris Daerah
10 Meningkatnya Infrastruktur jasa dan perdagangan	22 Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total pasar rakyat}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	23 Persentase pelabuhan rakyat dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah pelabuhan rakyat dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total pelabuhan rakyat}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Perhubungan

11	Meningkatnya aktivitas jasa dan perdagangan	24	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		25	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		26	Laju Inflasi	$\text{Inf} = \frac{\text{Inf}(n+1) - \text{Inf}(n)}{\text{Inf}(n)} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Bappelitbangda
12	Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	27	Jumlah produksi perikanan tangkap	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (perikanan tangkap - ton)}}{\text{Target daerah (ton)}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		28	Jumlah produksi perikanan budidaya	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (perikanan budidaya - ton)}}{\text{Target daerah (ton)}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Meningkatnya perlindungan wilayah pesisir	29	Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove	$\frac{\text{Jumlah kerusakan mangrove (n)} - \text{Jumlah kerusakan mangrove (n+1)}}{\text{Jumlah kerusakan mangrove (n+1)}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		30	Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang	$\frac{\text{Jumlah kerusakan ekosistem terumbu karang (n)} - \text{Jumlah kerusakan ekosistem terumbu karang (n+1)}}{\text{Jumlah kerusakan ekosistem terumbu karang (n+1)}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Meningkatnya kunjungan wisata	31	Jumlah kunjungan wisatawan lokal	Cukup Jelas	Laporan Tahunan	Dinas Pariwisata

	32	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Cukup Jelas	Laporan Tahunan	Dinas Pariwisata	
15	Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang pariwisata Kota Ternate	33	Jumlah tempat wisata yang dilestarikan dan dikembangkan	Sudah jelas	Laporan Tahunan	Dinas Pariwisata

DRAFT

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**